



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K j I P)



PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019

KOTA MUNGKID
TAHUN 2020



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja Organisasi
2. Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang merupakan wujud kewajiban BPBD Kabupaten Magelang dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok serta fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana

diatur Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kinerja BPBD Kabupaten Magelang tahun 2019 tergambar dalam tingkat capaian kinerja organisasi dan Realisasi Anggaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran capaian kinerja organisasi yang diukur adalah capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan dan dibandingkan dengan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya. Pengukuran capaian kinerja organisasi juga dilakukan perbandingan dengan target capaian kinerja pada Rencana Startegis BPBD Kabupaten Magelang 2014 – 2019.

Rumus penghitungan tingkat capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu : indikator positif dan indikator negatif dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

- Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai.

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Negatif)} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JAngka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan memberikan predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	Biru
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	Kuning
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	Coklat
5	≤ 50 %	Sangat rendah	Merah

Catatan : Kriteria penilaian tersebut untuk kinerja keuangan dan kinerja fisik. Apabila capaian kinerja lebih dari 100 % maka kriteria penilaian masuk katagori Sangat Tinggi. Untuk pewarnaan predikat tidak ada acuan yang mendasari, pewarnaan untuk mempermudah dalam membaca/menyimpulkan kriteria penilaian.

- Proses pengukuran kinerja tiap sasaran strategis dengan dilakukan analisa sebagai berikut :
- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (tabel 3.2 kolom 7)
 - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, (membandingkan capaian tahun 2016, 2017 dan 2018), dapat ditambahkan tabel/grafik tersendiri sesuai kebutuhan.

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target tahun terakhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2019 (Tabel 3.2. kolom 9).
 - d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) jika ada, dapat ditambahkan tabel/grafik tersendiri sesuai kebutuhan.
 - e. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan daerah sekitar yang sebanding (contoh dengan kabupaten Temanggung, Purworejo, Wonosobo) jika ada.
- Hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2019 terhadap 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat							
		Cakupan masyarakat yang mendapatkan pengetahuan kebencanaan	100	100	98.97	98.97	100	98.97
		Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100	100	103.51	103.51	100	103.51
		Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	86.25	100	100	100	100	100
		Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	96.66	100	94	94	100	94
	Rata-rata 2		97,55	100	99.12	99,12	100	99,12

Tabel 3.3.
Realisasi Anggaran Per program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2019 Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang

No	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	346.810.672,00	301.581.705	88.96
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	902.645.000,00	759.900.967	84.19
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	30.800.000,00	30.123.983	97.81
4	Peningkatan Kapasitas	135.925.000,00	115.179.772	84.74

	Sumberdaya Aparatur			
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	20.431.530,00	19.812.397	96.97
6	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	61.105.000,00	61.057.072	99.92
7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	22.143.000,00	21.543.891	97.29
8	Perencanaan Pembangunan Daerah	34.606.000,00	32.947.350	95.21
9	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	4.177.954.350,00	3.580.475.568	85.70
10	Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	199.009.500,00	197.823.012	99.40
	Jumlah	5.931.430.052,00	5.120.445.417	86.33

2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan melakukan analisis sebagai berikut:

a. Analisis terhadap penyebab/penunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan, permasalahan yang dihadapi serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Realisasi capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan target capaian kinerja tahun 2018.

Keberhasilan capaian kinerja di dukung oleh :

- 1) Keberhasilan dalam manajemen penanggulangan bencana ditunjang dengan adanya gotong royong/ peran serta pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
- 2) Penanggulangan Bencana diarahkan pada upaya pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- 3) Menekankan pembangunan kesiapsiagaan berbasis masyarakat dan peringatan dini.
- 4) Penanganan kedaruratan dengan segera yang melibatkan peran serta pemerintah, relawan dan pemerintah desa serta masyarakat.

Kegagalan capaian kinerja disebabkan oleh :

- 1) Kurangnya masyarakat dalam pemahaman tentang kebencanaan yang tinggal pada daerah rawan bencana
- 2) Peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha belum optimal

3) Ketergantungan masyarakat pada pemerintah masih tinggi dalam pendanaan kegiatan.

Solusi yang diharapkan adalah :

- 1) Masyarakat melalui perangkat desa lebih intensif dalam mensosialisasikan tentang daerah rawan bencana.
- 2) Meningkatkan peran serta yang aktif pemerintah dan dunia usaha dengan melibatkan masyarakat, akademisi dan media massa.
- 3) Masyarakat dapat mengusulkan pendanaan melalui dana desa.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Dilakukan evaluasi dan pemahasan tiap sasaran strategis.. Pengukuran kinerja sebagai sebagaimana tabel 3.4.

Tebel 3.4
Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2019 terhadap 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat							
		Cakupan masyarakat yang mendapatkan pengetahuan kebencanaan	100	100	98.97	98.97	100	98.97
		Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100	100	103.51	103.51	100	103.51
		Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	86.25	100	100	100	100	100
		Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	96.66	100	94	94	100	94
	Rata-rata 2		97,55	100	99.12	99.12	100	99,12

Penyebab Keberhasilan/kegagalan :

- 1) Keberhasilan dalam manajemen penanggulangan bencana ditunjang dengan adanya gotong royong/ peran serta pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

- 2) Penanggulangan Bencana diarahkan pada upaya pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- 3) Menekankan pembangunan kesiapsiagaan berbasis masyarakat dan peringatan dini.
- 4) Penanganan kedaruratan dengan segera yang melibatkan peran serta pemerintah, relawan dan pemerintah desa serta masyarakat.

Kegagalan dalam penanggulangan bencana karena:

- 1) Masih kurangnya dokumen atau aturan terkait penanggulangan bencana yang sudah dilegalisasi dan peraturan yang belum disusun sebagai amanat Perda No. 3 Tahun 2014. Peraturan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang yang sudah dilegalisasi adalah :
 - a) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - b) Peraturan Bupati no. 18 Tahun 2016 Tentang Rincian Tahapan dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang
 - c) Peraturan Bupati no. 46 Tahun 2018 Tentang Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021
 - d) Peraturan Bupati no. 48 Tahun 2018 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022.

Dokumen yang belum dilegalisasi adalah :

- a) Rencana Kontinjensi Erupsi Merapi
- b) Rencana Kontinjensi Tanah Longsor
- c) Rencana Kontinjensi Banjir Lahar Hujan

Peraturan yang belum selesai di susun adalah :

- a) Peraturan terkait penanganan pengungsi
 - b) Peraturan terkait tata cara pengelolaan bantuan masyarakat
- 2) Belum terselesaikannya pensertifikatan tanah hunian tetap

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam menyelesaikan kegagalan atau permasalahan :

- 1) Gotong royong manajemen penanggulangan bencana agar dapat berjalan dengan efektif masih diperlukan pemahaman yang sama antara seluruh pemangku kepentingan, bagaimana mengimplementasikan manajemen penanggulangan bencana yang efektif.
- 2) Melegalisasi dokumen terkait penanggulangan bencana
- 3) Segera menyusun peraturan terkait penanggulangan bencana terutama penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan tatacara pengelolaan bantuan masyarakat.

- 4) Menyelesaikan pensertifikatan tanah hunian tetap dan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Magelang.

Program/kegiatan yang menunjang capaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 10 (Sepuluh) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk pencapaian sasaran berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat yaitu :

- a) Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan
- b) Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat
- c) Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- d) Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana

c. Analisis atas efisiensi sumber daya

Analisis efisiensi dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100 % (seratus persen) atau lebih dan terdapat selisih capaian keuangan dalam pelaksanaan program, seperti terlihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang $\geq 100\%$	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1	Berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pengetahuan kebencanaan	98.97	92.96	6.01
		Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	103.51	91.91	11.60
		Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100	88.23	11.77
		Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	94	75.37	18.63

Analisa efesiensi dilakukan terhadap 1 (satu) sasaran dengan capaian indikator kinerja ≥ 100 %. Tingkat efiensi tertinggi pada indikator Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana dengan tingkat efisiensi mencapai 18,83%, sedangkan tingkat efisiensi terendah pada indikator Cakupan masyarakat yang mendapatkan pengetahuan kebencanaan dengan tingkat efisiensi mencapai 6,01%.

Untuk capaian kinerja yang kurang dari 100 % hal ini terjadi karena terdapat kegiatan yang realisasinya sangat rendah pada tahun 2019. Kegiatan pengadaan tanah untuk hunian tetap dikarenakan ada 2 lokasi yang tidak terbeli meliputi : (1) Desa Giripurno 1 kapling. Pada saat musyawarah harga pemilik lahan tidak hadir. Dikunjungi tidak berada di tempat. Kepala Desa yang menjadi penghubung tidak berada di tempat. (2) Dusun Bontoran Desa Krinjing. Tidak ada kesepajatan harga, appraisal Rp.185.000,00 penawaran awal Rp. 500.000,00. Namun saat akan dituangkan di berita acara musayawarah harga menyatakan keberatan kalau menawarkan tanahnya senilai Rp. 500.000,00. Meminta dituliskan penawaran Rp. 200.000,00. Sebagai catatan, di lokasi yang sama berhasil dibeli tanah dengan harga sesuai hasil appraisal. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan Sosial ekonomi dan Budaya Pasca bencana dengan serapan anggarannya 38,31 %. Hal tersebut karena Hibah peralatan mesin kopi kepada petani tidak dapat terealisasi disebabkan belum tercantum dalam KUA PPA

Pada tahun 2019 terjadi bencana di 624 titik kejadian yang tersebar di wilayah Kabupaten Magelang lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2018 sejumlah 447 titik kejadian. Penanganan bencana berhasil dilakukan dengan cepat dan tepat melalui tahap tanggap darurat bencana.

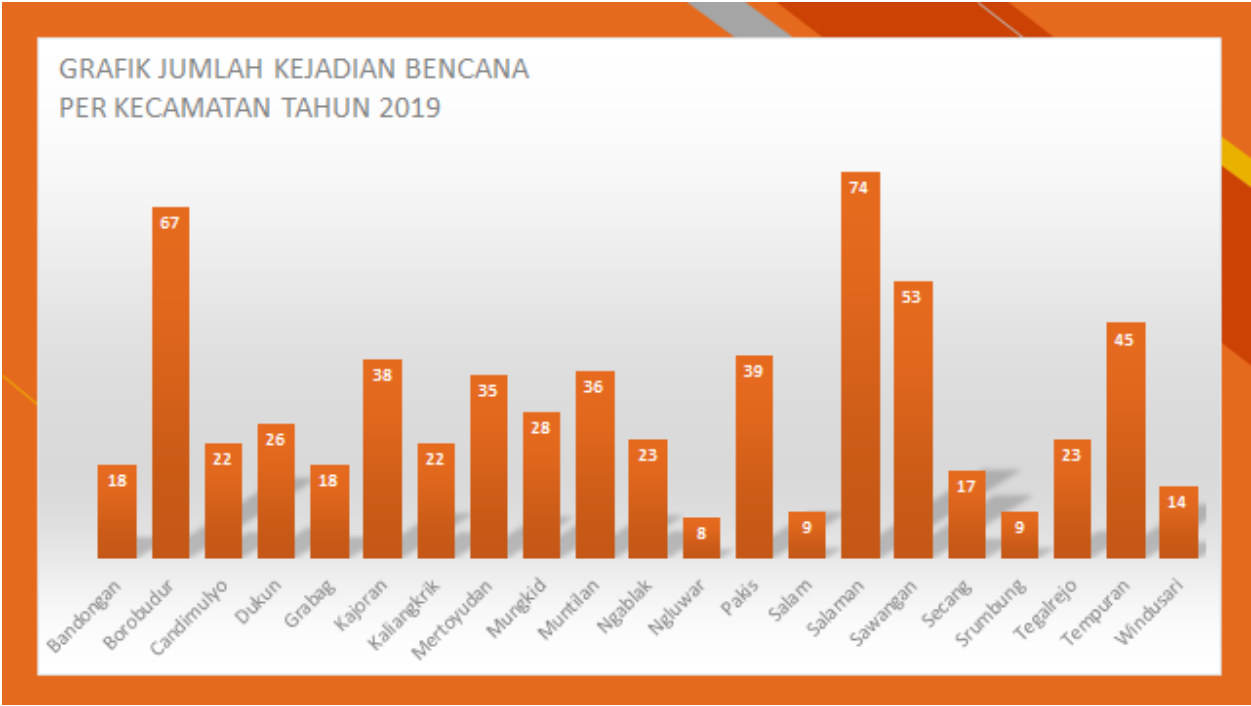
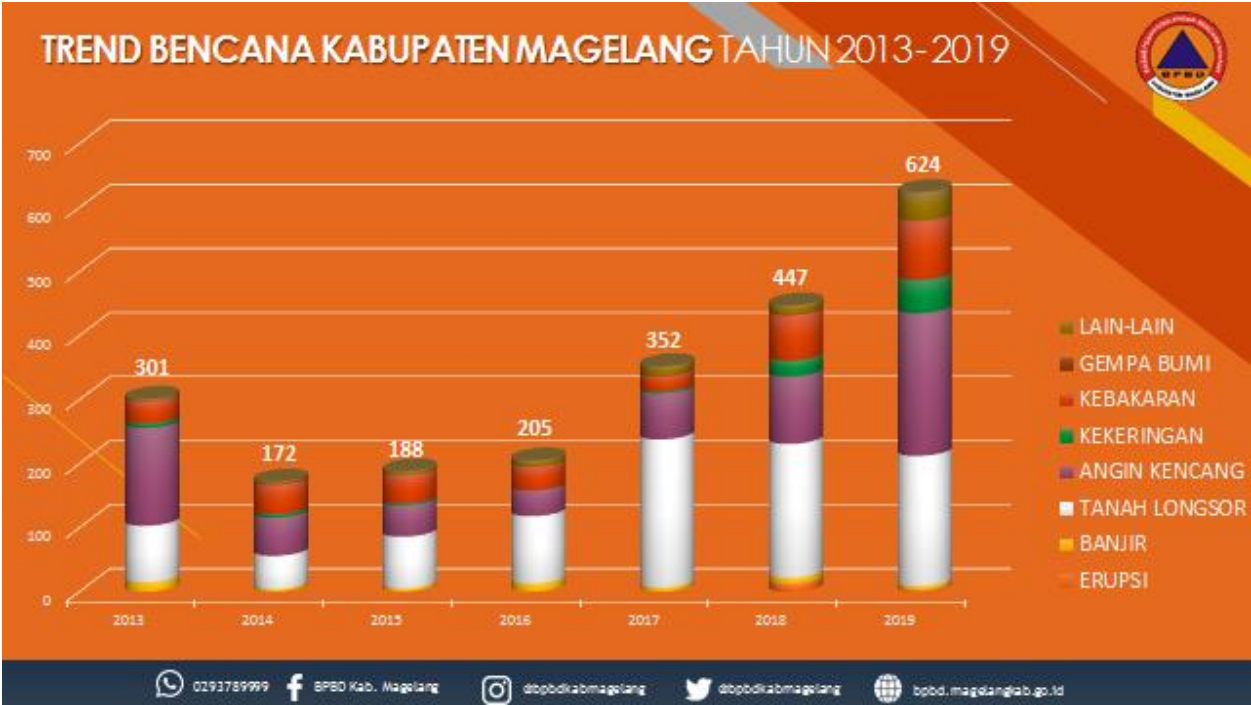
Dari sisi kejadian bencana, penanganan terbanyak di tahun 2019 adalah pada jenis bencana angin kencang dengan 223 kejadian disusul kemudian tanah longsor 203 kejadian, kebakaran 92 kejadian, kekeringan 52 titik, banjir 7 kejadian, erupsi 2 kejadian, dan kejadian lainnya 45. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Magelang tahun 2019 masih didominasi oleh jenis angin puting beliung/angin kencang dan bencana longsor.

Gambaran detail mengenai kejadian bencana di tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Kejadian Bencana di Kabupaten Magelang tahun 2019

No	Jenis kejadian	Jumlah kejadian	Rumah terdampak (unit)
1	Tanah Longsor	203	89
2	Kebakaran	92	49
3	Angin Kencang / puting	223	389

	beliung		
4	Banjir	7	19
5	Gunung api	2	0
6	Gempa bumi	0	0
7	Kekeringan	52	0
8	Kejadian lain	45	0
	Jumlah	624	546



Berdasarkan tabel dan grafik kejadian bencana terjadi tren kenaikan dari tahun ke tahun. Kecamatan yang sering terjadi bencana adalah kecamatan Salaman dan Borobudur yang didominasi oleh tanah longsor. Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.

Keberhasilan pencapaian kinerja dimaksud tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen masyarakat, pemangku kepentingan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang.

Untuk meningkatkan kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang kekurangan yang terjadi pada tahun sebelumnya telah dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja tahun 2019. Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran program tahun 2019 nantinya dapat dicapai dengan lebih baik, maka perlu dilakukan langkah-langkah atau strategi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara optimal sehingga dapat mewujudkan tugas pokok dan fungsi dengan baik sesuai aturan yang ada.
- b. Memperbanyak kajian teknis dalam bidang tugas yang berkaitan kebencanaan.
- c. Menganalisis permasalahan dalam penanganan bencana secara periodik, agar dalam penanganan bencana dapat cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Perencanaan kegiatan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan perlu dilakukan secara baik dan menyeluruh.
- e. Melakukan inovasi mitigasi bencana terkait dengan penanganan pengungsi erupsi merapi melalui pembentukan dan pengembangan desa bersaudara/sister village/paseduluran deso.

Prestasi-prestasi tingkat kabupaten dan di atasnya yang dicapai BPBD pada tahun 2019 sebagai berikut :

- Nama Penghargaan : **MISTERI CALON PENGANTIN PASESO MERAPI
(PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS MASYARAKAT)**
- Predikat : **TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019
TINGKAT NASIONAL**
- Penerima Penghargaan : Zaenal Arifin, SIP (Bupati Magelang)
- Tempat : Semarang

- Dokumentasi :



- Nama Penghargaan : **MISTERI CALON PENGANTIN PASESO MERAPI (PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS MASYARAKAT)**
- Predikat : **TOP 45 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019 TINGKAT NASIONAL**
- Penerima Penghargaan : Zaenal Arifin, SIP (Bupati Magelang)
- Tempat : Istana Wakil Presiden, Jakarta
- Dokumentasi :



- Nama Penghargaan : **PANCEN A SIKK (Pantauan Bencana dengan Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten)**
- Predikat : **TOP 10 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH**
- Penerima Penghargaan : Drs. Edy Susanto (Kepala Pelaksana BPBD Kab. Magelang)
- Tempat : Semarang
- Dokumentasi :



Dokumentasi Pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis SKPD pada tahun berjalan.



Pelatihan Tanggap Darurat



Penyusunan Rencana Kontinjensi Banjir Lahar Hujan tahun 2019



Apel Siaga Relawan Penanggulangan Bencana



Rapat Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana Antisipasi Musim Penghujan



Dropping air bersih darurat bencana



Dropping Logistik korban bencana



Penanganan dan kaji cepat kejadian angin kencang



Sosialisasi dan Gladi Simulasi Daerah Rawan Kabupaten Magelang



Pengerahan relawan dan penanganan kejadian tanah longsor



Gladi lapang dan evakuasi pengungsi



Gladi Posko penanganan darurat bencana